

# PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KELURAHAN UMBAN SARI KECAMATAN RUMBAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2022-2023

Oleh : Miftah Hilmi Hairani Lubis

Pembimbing: Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This research was conducted in RW 13, Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru City with the background of the problem of the lack of public awareness of environmental issues caused by the role of RT, RW which has not been maximized in disseminating information and encouraging citizen participation, and this program does not yet have sufficient resources to run the program optimally, so this study aims to determine the implementation of the climate village program in RW 13, Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru City so that new findings can be found related to the implementation of government policies in dealing with the impacts of climate change and obstacles in the implementation of the climate village program in RW 13, Umban Sari Village, Rumbai District, Pekanbaru City. This study uses a qualitative method with a descriptive research type. In collecting data using interview techniques, documentation and mass media. The data analysis technique used in this writing is qualitative data analysis. The theory used is the theory of policy implementation. This research is expected to be a tool for government policies related to disaster adaptation and mitigation efforts originating from climate change. The results of this study are that the communication strategy used in delivering proklam information is effective because community leaders are directly involved in delivering information and activity objectives. Human Resources and Budget for the Implementation of the Climate Village Program are still limited and are more self-help from the community. Support from the government, RT, RW and the community needs to be increased. The program implementation procedure is clear in accordance with the RoadMap ProKlim KLHK DirjenPPI, 2017. Obstacles in the Form of Lack of Public Awareness of Environmental and Climate Issues and Misalignment Between Community Needs and Government Programs.*

**Keywords:** Policy Implementation, Climate Village Program, Adaptation and Mitigation

### A. Latar Belakang Masalah

Urusan lingkungan hidup merupakan kewenangan daerah yang bersifat wajib, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah daerah, seperti pelayanan dasar lainnya. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat.

**Tabel 1 Data Pencemaran Air Sungai di Kota Pekanbaru**

No	Lokasi	Nilai	Status Perairan
1	Sungai Sail I	13,25	Tercemar Berat
2	Sungai Sail II	15,83	Tercemar Berat
3	Sungai Sail III	9,41	Tercemar Sedang
4	Sungai Limau	18,82	Tercemar Berat
5	Sungai Sago	31,56	Tercemar Berat
6	Sungai Umban	4,62	Tercemar Ringan
7	Sungai Air Hitam	8,13	Tercemar Sedang
8	Sungai Tenayan	6,45	Tercemar Sedang
9	Sungai Senapelan	29,41	Tercemar Berat
10	Sungai Pengambang	3,65	Tercemar Ringan
11	Sungai Sibam	8,14	Tercemar Sedang

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*

Kecamatan Rumbai Menjadi salah satu titik lokasi yang terdampak dari banjir pada musim curah hujan tinggi. Banjir luapan sungai siak melanda permukiman di Kecamatan Rumbai. Menurut BPBD kota

Pekanbaru banjir yang terjadi disebabkan oleh anak-anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi. Fenomena perubahan iklim telah membuat masalah perkotaan menjadi lebih sulit dalam beberapa tahun terakhir. ini memerlukan pemikiran yang lebih cermat dan pengembangan ide-ide inovatif yang dapat dimasukkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih komprehensif dan realistis untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim. (M. Hafizul Furqan, Daska Azis, 2020).

Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Hidup menyadari bahwa harus banyak inovasi dalam upaya mitigasi pencegahan bencana banjir di Kota Pekanbaru. Salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklam) amat penting dan membutuhkan perhatian khusus terutama dalam pelaksanaannya. Proklam yang telah diluncurkan pada Tahun 2011 ini memiliki payung hukum pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Kemudian pada Tahun 2015 dilakukan integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang diikuti dengan pengesahan peraturan pengganti melalui Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Program kampung iklim (Proklam) yang akan diwujudkan merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 1 Desember 2016. Program ini diupayakan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (Anugerah & Yahya, 2021).

Proklim mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat atau Community Based Development. Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai hal lain menjadi aspek yang ikut diperhatikan seperti; institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity), keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), yang pemanfaatan sumber daya lokal (local resource based).

Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang program kampung iklim. Adapun tujuan umum dilakukannya program kampung iklim ini adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim (Maula, 2020). Proklim merupakan kegiatan kolaborasi antara upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat dasar dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif serta dari berbagai pihak pendukung seperti pemerintah daerah dan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah (DirjenPPI, 2017).

Upaya adaptasi perubahan iklim dapat diintegrasikan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh masyarakat ditingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak iklim. Perubahan iklim sangat mungkin terjadi. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat harus diinventarisasi dan dicatat dengan baik agar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penguatan kapasitas adaptasi dapat diukur di tingkat nasional. Pendataan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat bottom-up, yaitu dengan mendorong berbagai pihak mengumpulkan informasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat nyata terhadap upaya penanganan perubahan iklim. Pendataan dan pengukuran manfaat tersebut dibatasi pada luasan tertentu dengan menggunakan terminologi “Kampung Iklim” yang menjadi satu program seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 (Ortega, 2023). Implementasi Program Kampung Iklim telah berjalan di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan merumuskan solusi dan target capaian dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan refleksi.

Mitra program ini adalah Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning. Yang dimana melibatkan 10 mahasiswa di setiap titik lokasi ProKlim dan didampingi oleh dosen dalam menginventarisasi data adaptasi dan ikut partisipasi saat pelaksanaan proklim. Kelompok ini diharapkan dapat diperkuat kelembagaannya, sekaligus menjadi penggerak jalannya koordinasi kegiatan mitigasi dan adaptasi Proklim secara kolektif di lingkungan RW 13 Umban Sari. RW 13 terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 420 KK dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, pedagang, pegawai, peternak dan sebagian buruh bangunan. Adapun kelompok mitra telah melakukan berbagai kegiatan iklim seperti pembuatan kompos, penanganan sampah, dan tanaman hias.

Dengan adanya Proklim, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin

meningkat. Hal ini karena masyarakat sudah merasakan dampak baik dari Proklim terutama dalam hal pengelolaan sampah. Proklim meningkatkan kemahiran warga dalam berorganisasi sehingga mendukung pengawasan dan proses pembangunan di desa. Harapannya, pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat dan prosesnya menjadi lebih transparan. Proklim juga telah membangun budaya peduli lingkungan. Selain mengolah sampah plastik, Proklim juga menghidupkan budaya pengelolaan limbah peternakan maupun pertanian melalui pembuatan pupuk kandang dan kompos. Sebelumnya, kotoran hewan dan sampah organik hanya dibuang begitu saja. mengolah sampah organik menjadi kompos dan pupuk kandang dari sisa peternakan untuk memberi pemasukan tambahan bagi warga. (Saputra et al., 2020).

Dalam konteks penelitian ini ada beberapa fenomena/masalah yang terjadi, *Pertama*, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan program Kampung Iklim (ProKlim). Hal ini berkaitan erat dengan kurangnya sumber daya. Kesadaran lingkungan yang rendah menyebabkan kurangnya keterlibatan warga dalam program ProKlim. salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya sosialisasi yang efektif. Dalam praktiknya, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas, sehingga banyak warga yang belum mengetahui atau menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya jangkauan sosialisasi adalah peran RT dan RW yang belum maksimal dalam menyebarkan informasi dan mendorong partisipasi warga.

*Kedua*, bantuan barang yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang datang

secara tiba-tiba tanpa adanya koordinasi dengan warga menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pemanfaatan fasilitas yang diberikan. Hal ini juga berdampak pada operasional yang cukup tinggi, sehingga menambah beban bagi masyarakat dalam menjalankan program. Penyamaan persepsi antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Pelaksanaan program membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, mulai dari pemeliharaan sarana, pelatihan, hingga insentif bagi warga yang terlibat aktif. Sayangnya, tidak semua dana operasional telah dipersiapkan, sehingga banyak kegiatan yang terhambat atau tidak berjalan secara optimal. Program yang diterapkan sering kali berbasis kebijakan nasional yang tidak selalu cocok dengan kondisi setempat.

Berdasarkan permasalahan di atas, terlihat bahwa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan kebijakan program kampung iklim di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, maka saya mengambil judul *“Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023”*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023?
2. Apa Saja Program Kerja Kegiatan Adaptasi Dan Mitigasi Yang Mendukung Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

2. Untuk mengetahui Program Kerja Kegiatan Adaptasi Dan Mitigasi Yang Mendukung Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

#### **D. Tinjauan Teori**

##### **1) Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output) (Nur & Guntur, 2019).

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo, bahwa komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo

bahwa perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi dan konsistensi (consistency), transmisi (transmission), kejelasan (clarity) (Budiharto, 2014).

2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran merupakan insentif yang diberikan kepada implementor, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan dan sumberdaya kewenangan untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek aspek seperti struktur birokrasi pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

## 2) Program Kampung Iklim

Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak melaksanakan aksi lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (Bappenas, 2011). Dikutip dari (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012) UU Nomor 19 pasal 1 yaitu program kampung iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi program kampung iklim (ProKlim) sebagai upaya tindak lanjut RAN-GRK dan RAD-GRK merupakan program berbasis masyarakat dengan lingkup nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. PROKLIM adalah program sertifikasi yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mengimplementasikan tindakan di bidang iklim mengubah mitigasi dan adaptasi. Selain itu, dirancang untuk meningkatkan kesadaran lokal masalah perubahan iklim dan mendorong

implementasi mitigasi dan lokal langkah-langkah adaptasi. Ini akan menyebabkan masyarakat menjadi kurang rentan dan menjadi lebih tangguh terhadap bencana perubahan iklim (Pelling, 2011).

## E. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Untuk mendeskripsikannya dari fenomena yang ada dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data yang dihimpun berbentuk kata maupun kutipan-kutipan berdasarkan data dan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi dalam memberikan dukungan terhadap penelitian yang berusaha disajikan (Siti Aminah dan Roikan, 2019)

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyederanaan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif ini bertujuan untuk mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak kemudian dianalisis lebih lanjut.

Lokasi penelitian ini dilakukan di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan temuan baru terkait dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan akibat perubahan iklim, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Pelaksanaan Program Kampung Iklim di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut dan mengetahui apa Program Kerja Kegiatan Adaptasi Dan Mitigasi yang telah terlaksana untuk Mendukung Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Dengan menggunakan teknik Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan media massa.

## **F. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023**

Di Indonesia pada tahun 2024 jumlah kampung iklim mencapai 10.113 lokasi. Jumlah ini merupakan hasil dari Program Kampung Iklim (Proklim) yang telah berjalan sejak tahun 2012. Sedangkan di Provinsi Riau ada 63 dusun/ kampung yang menerima trofi/sertifikat Program Kampung Iklim. Khususnya Pekanbaru Kelurahan Umban Sari menjadi salah lokasi yang menjalankan Program Kampung Iklim tersebut. Hasilnya pada tanggal 28 Oktober 2022, RW 13 Kelurahan Umban Sari mendapatkan sertifikat Proklim Madya yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim dengan presentase nilai akhir aksi proklim berdasarkan SRN antara 51-80% pada tahun 2022.

Pengusulan dan pendaftaran proklim dilakukan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) oleh berbagai pihak yang melaksanakan atau mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahkn iklim di tingkat tapak. Pengusul harus membuat akun dengan mengisi data pribadi dan data instansi atau kelompok masyarakat yang mengusulkan. Lalu pengusul Mengisi data wilayah yang diusulkan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan

Menyertakan dokumen pendukung seperti laporan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan, serta Mengunggah foto, video, dan bukti kegiatan lingkungan yang mendukung ProKlim. Lokasi yang didaftarkan sebagai kampung iklim di evaluasi dengan meninjau aspek keragaman aksi adaptasi, mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan yang ada dilokasi tersebut melalui kegiatan verifikasi lapangan.

Sistem Registri Nasional akan menjadi wadah pengelolaan data dan informasi aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Seiring dengan upaya pengarusutamaan isu perubahan iklim di tingkat kebijakan pemerintah, aksi pengendalian perubahan iklim telah pula diinisiasi oleh berbagai pihak. Ditingkat tapak, masyarakat baik inisiatif mandiri maupun melalui pendampingan mitra turut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Melalui SRN inilah, data dan informasi dari aksi maupun sumber daya yang digunakan upaya kolektif tersebut dihimpun. Ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Berdasarkan pada teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Menurut George C. Edward III terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi jika dikaitkan dengan hasil penelitian, yaitu:

1. Transmisi, penyaluram komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian

(miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Berdasarkan wawancara di atas, dalam implementasi kebijakan program kampung iklim di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru khususnya RW 13, informasi mengenai kebijakan proklam disampaikan secara efektif kepada masyarakat melalui forum rapat RT dan RW dan pertemuan santai lainnya. Peran DLHK dan Pemerintah Kelurahan umban sari dalam menyebarkan informasi terkait program ini berjalan baik dilihat dari kerja sama antara kedua pihak dalam mengedukasi program yang berlangsungnya komunikasi internal mencakup penyampaian informasi tentang tujuan kebijakan, strategi implementasi, tugas masing masing pihak, serta koordinasi dalam pelaksanaan.

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Dalam implementasi kebijakan program kampung iklim di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru khususnya RW 13, pada sebagian masyarakat masih belum memahami tujuan dan manfaat dari proklam, masih ada kebingungan dalam menjalankan proklam. Namun dalam kejelasan aturan atau prosedur dalam proklam di anggap sudah cukup jelas karena sudah terdapat buku panduan proklam dalam Road Map pusat dan Road Map Provinsi.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Sesuai hasil wawancara informasi dan kebijakan terkait proklam di sampaikan secara konsisten oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dan Instruksi Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Proklam di Pekanbaru.

### **Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Proklam Kepada Masyarakat RW 13 Kelurahan Umban Sari**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2022

#### **b. Sumberdaya**

Dalam bab kelima pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016, perihal tentang pembiayaan yang dibutuhkan kedalam keseluruhan proses dari pembentukan, pelaksanaan, pengembangan serta penilaian dari program kampung iklim berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya dilapangan sumber daya finansial atau pembiayaan di RW 13 Kelurahan Umban Sari bahwasannya dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) masih terbatas dan lebih banyak bersifat swadaya dari masyarakat. Karena belum ada anggaran khusus yang mencukupi, pelaksanaan program lebih banyak mengandalkan partisipasi dan inisiatif masyarakat. Swadaya ini mencakup tenaga, waktu, dan sumber daya lokal yang tersedia untuk menjalankan kegiatan Proklam. Pemerintah tidak memberikan anggaran dalam bentuk uang, tetapi



mendukung dalam bentuk bantuan barang, seperti bibit tanaman produktif dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan program.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyatakan sumber daya finansial proklam di alokasikan melalui APBD. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas atau alat alat pendukung. Namun, pencairan dana bergantung pada kondisi keuangan daerah. Jika anggaran tersedia, bantuan dapat diberikan kepada masyarakat. Jika tidak mencukupi, maka pemberian bantuan bisa tertunda atau bahkan tidak terealisasi.

Sumber Daya Manusia di DLHK Kota Pekanbaru memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya tetapi terkendala pada masih kurangnya jumlah SDM dalam mengelola Proklam. Pada sumber daya peralatan memiliki website SRN yang dikelola KLHK dan aplikasi berbasis android yang mendukung proses penginputan data, pendaftaran, pencatatan dan pemantauan hasil kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Menurut pendapat ketua Proklam RW 13 Kelurahan Umban Sari Masih kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

### **c. Disposisi**

Program kampung iklim ini tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana program di tingkat daerah. Pelaksana kebijakan menekankan bahwa tidak hanya satu bidang yang terlibat dalam Proklam, tetapi juga berbagai bidang lain yang memiliki tujuan sejalan. Ini menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan. Dengan adanya keterlibatan aktif dan kerja sama antarbidang, implementasi Proklam

dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Ketua Proklam RW 13 Kelurahan Umban Sari menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) dengan berbagai langkah konkret yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengajak warga untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemanfaatan energi terbarukan, program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Ketua Proklam RW 13 menyatakan bahwa istilah Proklam (Program Kampung Iklim) sebenarnya baru mereka ketahui belakangan ini. Namun, tanpa disadari, mereka sudah menjalankan kegiatan yang mendukung program tersebut sejak tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mereka lakukan jauh sebelum ada istilah resmi Proklam. Tantangan utama yang mereka hadapi saat ini adalah bagaimana mengemas atau merancang kembali kegiatan-kegiatan tersebut agar sesuai dengan standar dan kategori yang ditetapkan dalam program Proklam.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mencerminkan upaya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yaitu Kebun Bibit Rakyat menunjukkan inisiatif dalam penghijauan dengan menyediakan bibit tanaman untuk masyarakat, yang berkontribusi terhadap konservasi lingkungan. Reboisasi satu kelurahan langkah nyata dalam meningkatkan tutupan hijau, menjaga kualitas udara, serta mengurangi dampak pemanasan global dan erosi tanah. Pelatihan kompos Upaya pengolahan sampah organik untuk mengurangi limbah. Pelatihan bank sampah Mendorong kesadaran masyarakat dalam

memilah dan mendaur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi melalui sistem tabungan berbasis sampah. Keberhasilan dalam mendapatkan Sertifikat ProKlim Madya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam program nasional ini. Pernyataan ini menekankan bahwa keberhasilan ProKlim bukan hanya berasal dari program yang telah berjalan, tetapi juga dari sikap, komitmen, dan respon positif dari para pelaksana kebijakan. Komitmen ini mencerminkan keseriusan dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan utama ProKlim, yaitu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, dapat terwujud.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memastikan bahwa setiap level organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dengan baik. Dengan demikian, tidak ada tumpang tindih kewenangan, dan setiap unit dapat fokus pada tugas spesifiknya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Keberhasilan ProKlim juga bergantung pada kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah kecamatan dan kelurahan, komunitas lokal, serta dunia usaha. Struktur birokrasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang lebih mudah dan sinergi dalam menjalankan kebijakan. DLHK Kota Pekanbaru telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada regulasi nasional yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim serta kebijakan daerah yaitu Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Proklam di Pekanbaru. Hal ini memastikan

bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam implementasi ProKlim, DLHK Kota Pekanbaru secara rutin melakukan sosialisasi, pendampingan teknis, serta evaluasi terhadap desa atau kelurahan yang mengikuti program. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur, DLHK Kota Pekanbaru dapat memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target dan dapat menyesuaikan strategi jika diperlukan.

Adanya aturan yang jelas membantu memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi memungkinkan adanya mekanisme evaluasi terhadap program yang dijalankan. Dengan pelaporan dan evaluasi berkala, pemerintah kelurahan dapat mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan ProKlim dan menyesuaikan strategi yang lebih efektif. ProKlim di Umban Sari tidak hanya dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (Unilak), serta perusahaan seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR). Bentuk kerja sama ini mencakup pembinaan, pelatihan, studi lapangan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan, serta pemberian bibit tanaman sebagai langkah konkret dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan nyata seperti pemberian bibit tanaman kepada warga di RW 13 bertujuan untuk meningkatkan penghijauan di lingkungan sekitar dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam ProKlim. Proses kerja sama ini kemungkinan melibatkan kesepakatan resmi, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta pelaksanaan program berbasis kebutuhan masyarakat. Akademisi dan mitra industri

secara aktif turun ke lapangan untuk membina masyarakat, khususnya dalam pembuatan kompos dan biogas. Studi banding dilakukan untuk mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan limbah organik, terutama yang berasal dari peternakan.

### **Gambar 2 Pemberian Bibit Tanaman Ke RW 13 Kelurahan Umban Sari Sebagai Bentuk Kerja Sama dan Dukungan Dari Kemitraan**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2022

## **2. Program Kerja Kegiatan Adaptasi Dan Mitigasi Yang Mendukung Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023**

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim menjelaskan komponen kegiatan Proklamasi meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian program iklim di tingkat lokal. Maka ditemukan program kerja yang mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023, sebagai berikut;

### **a. Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim**

#### **1. Pengelolaan Sumber Daya Air**

##### **1) Taman Pancing**

Meskipun taman pancing umumnya dikenal sebagai tempat rekreasi, dalam konteks ini taman pancing memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana konservasi air. Kolam yang terdapat di taman pancing yang dirancang untuk menampung air hujan sehingga bisa berfungsi sebagai area resapan. Air yang tersimpan dalam kolam tersebut juga menjadi cadangan yang sangat berguna pada musim kemarau, ketika pasokan air mulai berkurang. Dengan demikian, taman pancing bukan hanya memberikan manfaat sosial dan ekonomi sebagai tempat hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang signifikan dalam membantu masyarakat menghadapi dampak dari pola cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim.

### **Gambar 3 Taman Pancing Upaya Adaptasi Menekankan Pengelolaan Sumber Daya Air**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2022

## **2. Peningkatan Ketahanan Pangan**

### **1) Kebun Bibit Rakyat**

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat merupakan upaya adaptasi yang mendukung ketahanan pangan dan pemulihan lingkungan dengan menyediakan bibit tanaman yang adaptif terhadap kondisi iklim lokal seperti tanaman hortikultural, buah-buahan dan tanaman pangan tahan iklim. Mendukung kemandirian pangan lokal melalui kebun-kebun produktif di pekarangan atau lahan bersama dan Mengurangi ketergantungan masyarakat

pada pasokan pangan eksternal, terutama saat terjadi gangguan akibat perubahan iklim.

#### **Gambar 4 Kebun Bibit Rakyat di RW 13 Kelurahan Umban Sari**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2022

#### 2) Sentral Peternakan

Peternakan sapi yang dikelola secara mandiri dan berfokus pada kebutuhan kurban berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Dengan setiap peternak mampu memelihara 40-60 ekor sapi jantan, RW 13 memiliki potensi besar dalam menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat, terutama saat perayaan Idul Adha. Peternakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola dan investor, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Sentral Peternakan merupakan kegiatan budidaya hewan ternak secara terpusat dan terpadu oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan lokal.

#### **Gambar 5 Sentral Peternakan**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2022

#### **b. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim**

##### **1. Pengelolaan Limbah**

##### 1) Pemanfaatan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos

Pemanfaat limbah organik seperti kotoran sapi merupakan salah satu upaya strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam konteks Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk kompos adalah salah satu kegiatan nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk kompos merupakan bentuk nyata dari aksi mitigasi berbasis masyarakat yang efektif, murah, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ProKlim, kegiatan ini mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya lokal secara bijak.

**Gambar 6 Pemanfaatan Limbah organik menjadi Pupuk Kompos**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2022

**Gambar 7 Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Reboisasi di RW 13 Kelurahan Umban Sari**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2023

## **2. Peningkatan dan Mempertahankan Tutupan Vegetasi**

- 1) Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Reboisasi  
Upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan dan mempertahankan tutupan vegetasi merupakan langkah penting yang berfokus pada penyerapan gas rumah kaca (GRK) dari atmosfer, terutama karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Pemanfaatan lahan kosong untuk reboisasi merupakan langkah strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan dan pemeliharaan tutupan vegetasi. Melalui program kerja yang terintegrasi mulai dari identifikasi lahan, pemilihan tanaman, keterlibatan masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi, dampak positif dari reboisasi tidak hanya terbatas pada penyerapan karbon, tetapi juga mendukung keseimbangan ekosistem, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kesuksesan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kolaborasi berbagai pihak, serta komitmen jangka panjang untuk menjaga dan merawat vegetasi yang telah ada.

- 2) Pemanfaatan Lahan Sebagai Tempat Wisata Argopuro

Kawasan Argopuro, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya, sangat potensial dikembangkan sebagai ekowisata atau wisata alam berbasis konservasi. Wisata berbasis konservasi mendorong berbagai aktivitas yang menjaga atau bahkan menambah tutupan vegetasi melalui penanaman pohon di kawasan wisata. Penyerap karbon (carbon sink) alami yang menyerap CO<sub>2</sub> dari atmosfer. Mengatur siklus air dan suhu lokal, mengurangi risiko kekeringan dan banjir. enahan erosi dan pelindung keanekaragaman hayati, yang berperan dalam kestabilan ekosistem. Pemanfaatan lahan wisata di Argopuro dalam konteks ProKlim bukan hanya menjadi sarana ekonomi alternatif, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga tutupan vegetasi yang berdampak langsung terhadap mitigasi perubahan iklim. Kuncinya adalah memastikan kegiatan wisata berjalan seimbang dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

**Gambar 8 Pemanfaatan Ekosistem sebagai Tempat Wisata Argopuro di Kampung Iklim RW 13 Kelurahan Umban Sari**



Sumber: Dokumentasi RW 13 Kelurahan Umban Sari, 2023

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim Di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 adalah Strategi komunikasi yang digunakan dalam penyampaian informasi proklam berjalan efektif karena pemerintah dan RT dan RW sebagai tokoh masyarakat terjun langsung dalam penyampaian informasi. Pendekatan ini juga mencerminkan strategi komunikasi berbasis komunitas, di mana informasi tidak hanya disampaikan secara satu arah, tetapi juga melalui dialog dan keterlibatan aktif masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan implementasi program. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Implementasi Program Kampung Iklim masih terbatas dan lebih banyak bersifat swadaya dari masyarakat. Implementasi ProKlim membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pemahaman tentang perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi. Namun, jumlah

tenaga ahli atau fasilitator yang mendukung program ini masih terbatas. Sebagian besar tenaga yang terlibat adalah masyarakat setempat yang berpartisipasi secara sukarela. Dana yang tersedia untuk menjalankan program ini masih minim, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karena itu, banyak kegiatan dalam ProKlim yang mengandalkan partisipasi aktif dan swadaya dari masyarakat. Dukungan dari pemerintah, RT,RW dan Masyarakat perlu ditingkatkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim maka perlu menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam fasilitas, pendampingan, dan insentif bagi masyarakat, menunjukkan perlunya meningkatkan peran pemerintah dalam pembinaan serta penyediaan sumber daya yang memadai melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan pihak swasta. Prosedur pelaksanaan program sudah jelas sesuai dengan RoadMap ProKlim KLHK DirjenPPI, 2017, dengan memberikan arahan terkait bagaimana suatu wilayah bisa menjadi bagian dari ProKlim, termasuk kriteria yang harus dipenuhi, indikator keberhasilan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim menjelaskan komponen kegiatan Proklam meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian program iklim di tingkat lokal. Maka ditemukan program kerja yang mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi dalam pelaksanaan Program

Kampung Iklim Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 yaitu kegiatan adaptasi yang terdiri dari Pengelolaan Sumber Daya Air yang menghasilkan taman pancing, Peningkatan Ketahanan Pangan dengan program kerja kebun bibit rakyat dan sentral peternakan. Kegiatan mitigasi yang terdiri dari Pengelolaan Limbah dengan memanfaatkan limbah organik menjadi Pupuk Kompos dan Peningkatan dan Mempertahankan Tutupan Vegetasi dengan memanfaatkan Lahan Kosong untuk Reboisasi serta Pemanfaatan Lahan Sebagai Tempat Wisata Argopuro.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang diupayakan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan manfaat ProKlim. Serta melakukan kajian ulang terhadap kebijakan ProKlim agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Melibatkan warga RW 13 dalam perencanaan dan implementasi program agar lebih relevan dan efektif. Mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan ProKlim, termasuk bantuan peralatan dan teknologi ramah lingkungan.
2. RT, RW dan Aparat Kelurahan Umban Sari dapat mengadakan kegiatan gotong royong rutin untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan. Mengusulkan program berbasis kebutuhan nyata warga agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.
3. Bagi masyarakat RW 13 Kelurahan Umban Sari diharapkan meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap isu lingkungan,

dengan menerapkan pola hidup ramah lingkungan, seperti memilah sampah, menanam pohon, dan menghemat energi.

## Daftar Pustaka

- Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Ahmad, S. N. A., Latipah, S., & Oktaviani, I. (2023). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kampung Iklim Di Wilayah Kota Tangerang. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 1(2), 161–183.
- Anugerah, M. F., & Yahya, M. R. (2021). Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Studi Administrasi)*, 5(34), 10–31.
- Budiharto, W. (2014). *Teori dan implementasi*. Edisi Revisi (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Budiharto, W. (2010). *Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta Penerbit Andi.
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, G. U. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Fitria, S. & Wazni (2020). Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Tahun 2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9, 1–11.
- Hernimawati, H., Dailiati, S., & Sudaryanto, S. (2022). Sekolah Lapang Iklim di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 339–345.

- Krishno Hadi, Listiano Asworo, I. T. S. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal of Government Civil Society*, 4(1), 115–129.
- Maula, I. (2020). *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Program Kampung Iklim*. Skripsi. Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- M. Hafizul Furqan, Daska Azis, R. W. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 5(2), 42–49.
- Morissan, Andy Corry Wardhani, F. H. (2010). *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya dan Masyarakat* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Muhibbin, M., Sugiharto, U. S., & Parmono, B. (2020). Partisipasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pencegahan Bencana Banjir. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 9(2), 218.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Badan Penerbit UNM* (Issue April).
- Ortega, L. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 4676–4684.
- Riani, A., Suwitri, S., & Kurniasih, Y. (2024). Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 28–40.
- Saputra, T., Sufi, W., Kuning, L., Pekanbaru, K., Pekanbaru, K., Lancang, U., Lancang, U., & Pekanbaru, K. (2020). Pembentukan Kampung Iklim Di RW 13 Kelurahan Umban Sari Kota Pekanbaru. *Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 6-12.
- Saputra, T., & Eka, E. (2022). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis Service Excellence pada car wash Kota Pekanbaru. *Kacanegara Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 157-166.
- Siti Aminah dan Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta
- Susanti, A. A., Antika, A. A., Pratama, R., Pradana, F. G., Handayani, S., & Sutaryono, S. (2022). Implementasi dan Pengembangan Program Unggulan Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Kertonatan. *Buletin KKN Pendidikan*, 4(1), 58–68.
- Urbanus, A., Sela, R. L. E., & Tungka, A. E. (2021). Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Spasial*, 8(3), 447–458.